

# DOKUMEN RENSTRA

2025-2029



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

# KATA PENGANTAR

SALAM PRAJA WIBAWA



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan pertolonganNya penyusunan perubahan rencana strategis perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik sebagaimana harapan kita semua.

Beberapa penyesuaian pada dokumen Renstra Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Disadari ada banyak kekurangan dalam penyusunannya selain saran dan kritikan semua pihak dibutuhkan dukungan dan komitmen pimpinan daerah untuk menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mempengaruhi capaiannya, oleh karena itu kepada semua pihak pemerhati bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kami nantikan saran dan kritik untuk kesempurnaannya. Akhirnya kata, kami berharap bahwa Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 berbentuk dokumen perencanaan dapat bermanfaat sebagai panduan perencanaan tahunan.

Pangkalan Bun, 2025

Pt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kab. Kotawaringin Barat



**AMIR HADI, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710728 199803 1 007

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Matrik .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Dasar Hukum .....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	5
a. Maksud .....	5
b. Tujuan.....	6
4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	9
a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	9
b. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	11
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah .....	20
e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan.....	21
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	22
a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah .....	22
b. Isu Strategis.....	25
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>29</b>
1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..	29
2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	32
a. Strategi Perangkat Daerah.....	32
b. Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	35
c. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah .....	36
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS .....</b>	<b>38</b>
1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah .....	38
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Trantibumlinmas.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
1. Kesimpulan .....	71
2. Kaidah Pelaksanaan .....	71
3. Pengendalian dan Evaluasi .....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Per Januari 2025.....	13
Tabel 2.2	Daftar Aset Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat.....	13
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pelayanan PD .....	16
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Pol PP...	18
Tabel 2.5	Kelompok Sasaran Layanan.....	21
Tabel 2.6	Kegiatan Lintas Sektoral.....	22
Tabel 2.7	Analisa Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
Tabel 2.8	Identifikasi Permasalahan .....	25
Tabel 2.9	Telaah Perumusan Isu Strategis .....	27
Tabel 2.10	Analisis SWOT .....	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	31
Tabel 3.2	Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT	34
Tabel 3.3	Alternatif strategis menurut perspektif .....	35
Tabel 3.4	Penentuan Strategi Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat.....	36
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Strategis Tahun 2025-2029 .....	37
Tabel 3.6	Pentahapan Renstra Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat .	38
Tabel 4.1	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat .....	40
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan .....	52
Tabel 4.3	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	68
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama .....	70
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci .....	70
Tabel 4.6	Standar Pelayanan Minimal.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	11
------------	--	----

## DAFTAR MATRIK

Matrik 2.1	Pagu Indikatif 2025-2029 Pada Satpol PP .....	15
Matrik 3.1	<i>Logical Framework</i> Satuan Pol PP .....	32

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimana dalam ketentuan umumnya, yang dimaksud dengan Rencana Stretegis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (1), Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang disusun setiap tahun oleh perangkat daerah. Renstra juga menjadi pedoman bagi personil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai target-target kinerja yang ada didalamnya.

Kualitas penyusunan Renstra perangkat daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi perangkat daerah serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Renstra perangkat daerah. Renstra perangkat daerah menjawab tiga pertanyaan dasar yakni: (a) sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) bagaimana mencapainya; dan (c) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten. Sebagian substansi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek Pembangunan pemerintahan, pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami beberapa perubahan dan yang paling terakhir adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat.

Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat didalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Tidak hanya itu, dalam hal pelaksanaan tugas Satpol PP juga untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha mikro (UMKM) untuk tetap dapat merasa aman, tentram dan tertib dalam menjalankan usaha sehingga mampu tumbuh dan berkontribusi dalam percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan Restra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui pendekatan manajemen strategik, *logic model*, berfikir sistem dinamik.

## 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- l. Peraturan Menteri Dalam Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- p. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 3).
- u. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Adapun maksud disusunnya Rencana Strategis Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 yaitu digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang Satpol PP untuk dapat merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun selama 5 (lima) tahun sebagai langkah strategi mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029.

Visi tersebut adalah “**Kotawaringin Barat Makin Jaya**” (**Maju, Kinerja Berkelanjutan, dan Menuju Kejayaan**). Sedangkan untuk misi, Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat masuk didalam misi ke II yaitu “**Mendorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Kerakyatan Dan Hilirisasi Potensi Daerah**”. Harapannya adalah peran Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat dalam menegakan perda dan perkara, menyelenggarakan trantibum serta perlindungan masyarakat dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada pelaku usaha mikro (UMKM) untuk tetap dapat merasa aman, tentram dan tertib dalam menjalankan usaha sehingga investor dan pelaku usaha mikro mampu tumbuh dan berkontribusi dalam percepatan pembangunan berkelanjutan.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Mensinergikan rencana pembangunan daerah urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 3) Menganalisis isu-isu strategis, arah kebijakan, strategis dan kinerja pelayanan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 4) Merumuskan tujuan, sasaran perangkat daerah beserta indikatornya sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
- 5) Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat.

#### **4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab yaitu:

##### **Bab I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;



3. Maksud dan Tujuan; dan
4. Sistemika Penulisan.

## **Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya);
  - d. Kelompok Sasaran Layanan;
  - e. Mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan (apabila ada);
  - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada); dan
  - g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada).
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
  - b. Isu Strategis.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, Indikator, Target dan

- Pagu Indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
  5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
  6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

# **BAB II** GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## **1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

### **a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

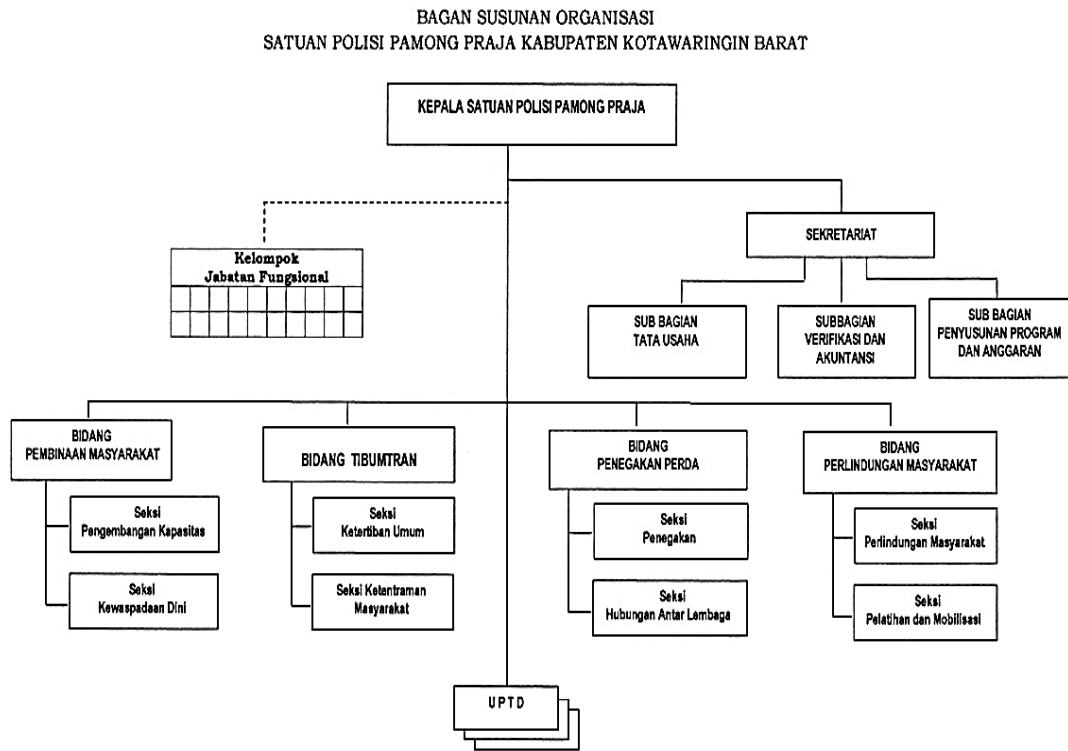
Satuan Pol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Satuan Pol PP menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengikutan proses penyusunan peraturan daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- 2) pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- 3) pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- 5) pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- 6) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;

- 7) pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian, ppns dan/atau aparatur lainnya;
- 8) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau satuan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 11) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 12) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
- 13) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 14) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 15) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat;
- 16) penyelenggaraan unit pelaksana Satpol Pamong Praja kecamatan dan jabatan fungsional;
- 17) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- 18) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

## b. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1) Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2026.

Dalam menjalankan tugas Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat pada Tahun 2025 memiliki personil sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) orang. 40 (Empat puluh) PNS, 15 (Lima Belas) orang

CPNS, PPPK sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dan tenaga outsourcing sebanyak 4 (empat) orang, dengan kualifikasi yang terbagi sebagai berikut:

a) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga outsourcing pada Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat yang terdiri dari:

- (1) Pejabat struktural : 14 orang
- (2) Pejabat fungsional : 33 orang
- (3) Pelaksana/staf : 8 orang
- (4) PPPK : 38 orang
- (5) CPNS : 15 Orang
- (6) Tenaga Outsourcing : 4 orang

b) Kualifikasi golongan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

- (1) Golongan IV : 5 orang
- (2) Golongan III : 35 orang
- (3) Golongan II : 15 orang

c) Pendidikan Formal

- (1) Strata 2 : 4 orang
- (2) Strata 1/DIV : 9 orang
- (3) Diploma III : 4 orang
- (4) SMA/SMK/MA : 70 orang

d) Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Diklat PIM 3 : 3 orang
- (2) Diklat PIM 4 : 8 orang
- (3) Diklat PPNS : 4 orang
- (4) Diklatsar Pol PP : 23 orang
- (5) Diklat PAMWAL : 3 orang
- (6) Diklat fungsional : 15 orang

Secara lebih rinci terlihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Data Pegawai Per Januari 2025

No	Jabatan	Jumlah Pegawai Yang ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian		
			Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SMA	SD	PNS/CPNS	PPPK	
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Jabatan:											
	1. Administrator	5	5	-	1	4	-	-	-	5	-	
	2. Pengawas	9	7	2	2	6	1	-	-	9	-	
	3. Pelaksana	44	36	8	-	2	3	39	-	10	36	
C	Jabatan Fungsional	35	27	8	1	7	-	31	-	33	2	
<b>Jumlah</b>		<b>93</b>	<b>75</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	

Sumber data: Bezetting Kepegawaian Satpol PP, 2025

## 2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam kinerja OPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat tertera pada tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.2  
Daftar Aset Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Satuan
1	Tanah		1	Bidang
2	Peralatan dan Mesin	Alat Besar	1	Unit
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Set
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	60	Unit
		Alat Studio, Komunikasi	18	Unit
		Alat laboratorium	10	Unit
		Alat Persenjataan	44	Unit
		Kendaraan Roda Dua	13	Unit
		Kendaraan Roda Empat	9	Unit
3	Gedung Dan Bangunan	Kendaraan Roda Enam	1	Unit
		Bangunan Gedung Kantor	19	Unit
		Gedung Rumah Dinas	2	Unit
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Jalan	-	
		Jembatan	-	
		Instalasi Listrik Dan Telp	-	

5	Aset tetap lainnya	Bahan Perpustakaan	46	buku
		Barang Bercorak Kesenian	-	
6	Aset tetap lainnya	Aset Tak Berwujud		
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Paket

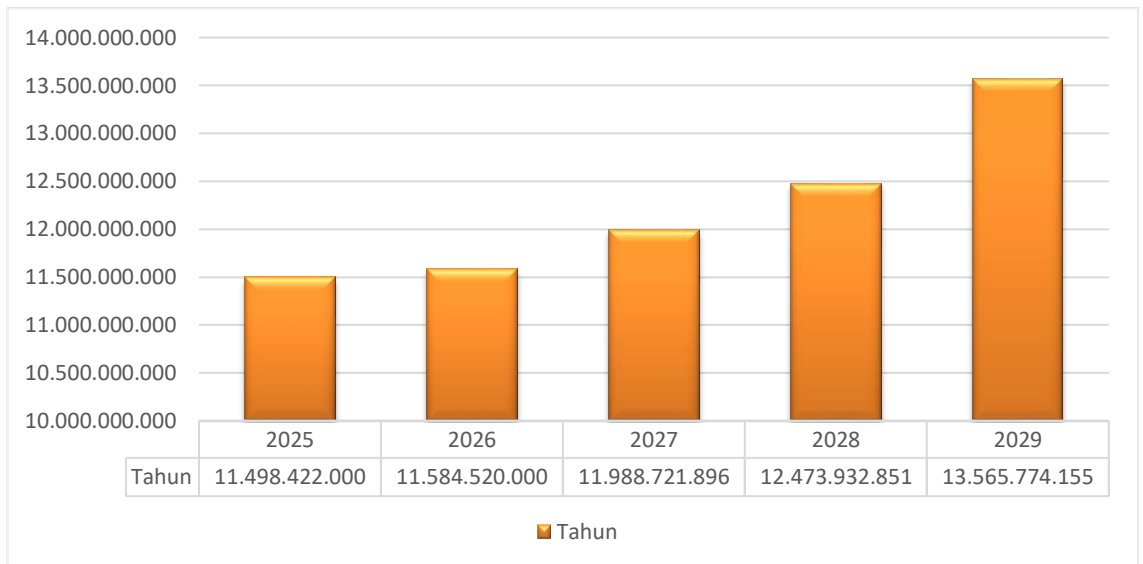
Sumber: Data Aset, 2025

### 3) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran yang tersedia dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat adalah berasal dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi dan dampak maka perlu adanya suatu program pembangunan politik, dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat akan terwujud dengan baik apabila di dukung anggaran yang cukup memadai, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN serta sumber dana lainnya, dengan indikator tersebut sangat dibutuhkan tersedianya:

- a) Dana anggaran yang cukup memadai.
- b) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kotawaringin Barat.
- c) Adanya kemampuan dan komitmen kongkrit di dalam pengelolaan suatu organisasi.

Ketersediaan anggaran pada Tahun 2025-2029 dapat disajikan pada Matrik 2.1 sebagai berikut.



Sumber: Pagu indikatif Renstra 2025-2029

**Matrik 2.1**  
Pagu Indikatif 2025-2029 Pada Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>															
	1. Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda	55	58	60	63	68	51,01	53,88	60	63	68	94,32	92,89	100	100	100
	2. Persentase Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>B.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)</b>															
	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	75	80	83	85	88	75	80	83	85	88	100	100	100	100	100
	2. Persentase Perda Perkada yang Ditegakkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>C.</b>	<b>STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>															
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	0	0	1 unit	2 unit	153 unit	0	0	1 unit	2 unit	153 unit	100	100	100	100	100
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	1 dok	0	5 dok	5 dok	8 dok	1 dok	0	5 dok	5 dok	8 dok	100	100	100	100	100



	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	0	0	0	461 org	294 org	0	0	0	461 org	294 org	0	0	0	100	100
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	0	0	0	1 dok	1 dok	0	0	0	1 dok	1 dok	0	0	0	100	100

Sumber: data yang diolah, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat**

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (%)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.637.945.000</b>	<b>1.816.871.600</b>	<b>1.813.360.000</b>	<b>3.243.062.200</b>	<b>5.674.455.516</b>	<b>2.604.117.298</b>	<b>1.802.125.944</b>	<b>1.791.149.020</b>	<b>2.834.395.235</b>	<b>4.258.359.972</b>
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.583.791.000	1.801.645.000	1.797.160.000	3.000.868.700	5.432.093.238	2.550.230.898	1.787.490.944	1.775.069.020	2.753.945.235	4.094.919.947
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	54.154.000	15.226.600	16.200.000	203.657.500	145.164.000	53.886.400	14.635.000	16.080.000	80.450.000	97.884.500
<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>1.223.925.550</b>	<b>2.039.449.756</b>	<b>3.539.770.000</b>	-	-	<b>1.202.034.520</b>	<b>2.016.684.105</b>	<b>3.042.961.752</b>	-	-
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	261.600.000	2.039.449.756	3.314.770.000	-	-	258.190.000	2.016.684.105	2.818.241.752	-	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	962.325.550	-	225.000.000	-	-	943.844.520	-	224.720.000	-	-

Uraian Program dan Kegiatan	Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>2.604.117.298</b>	<b>1.802.125.944</b>	<b>1.791.149.020</b>	<b>2.834.395.235</b>	<b>4.258.359.972</b>	<b>98,72</b>	<b>99,19</b>	<b>98,78</b>	<b>87,40</b>	<b>75,04</b>	<b>10,39</b>	<b>6,28</b>
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.550.230.898	1.787.490.944	1.775.069.020	2.753.945.235	4.094.919.947	98,70	99,21	98,77	91,77	75,38	10,30	6,23
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	53.886.400	14.635.000	80.450.000	80.450.000	97.884.500	99,51	96,11	99,26	39,50	67,43	-49,47	-40,35
<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>1.202.034.520</b>	<b>2.016.684.105</b>	<b>3.042.961.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,21</b>	<b>98,88</b>	<b>85,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,59</b>	<b>18,53</b>
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	258.190.000	2.016.684.105	2.818.241.752	0	0	98,70	98,88	85,02	0	0	31,41	28,91
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	943.844.520	0	224.720.000	0	0	98,08	0	99,88	0	0	25,00	25,00

Sumber: Laporan RFK

### Keterangan:

- Rasio antara Realisasi dan Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Tahun ke } - n}{\text{Anggaran Tahun ke } - n} \times 100\%$$



- Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Pertumb. Anggaran} &= \frac{\text{Jml. Anggaran Th. ke } (n) - \text{Jml. Anggaran Th. ke } (n - 1)}{\text{Jml. Anggaran Th. ke } (n - 1)} \times 100\%; \quad \% \text{ Pertumb. Realisasi} \\ &= \frac{\text{Jml. Realisasi Th. ke } (n) - \text{Jml. Realisasi Th. ke } (n - 1)}{\text{Jml. Realisasi Th. ke } (n - 1)} \times 100\% \end{aligned}$$

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran/Realisasi = (% Pertumbuhan Th. 2018 + % Pertumbuhan Th. 2019 + % Pertumbuhan Th. 2020 + % Pertumbuhan Th. 2021) / 4



#### d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode perencanaan strategis dalam bentuk Tabel 2.5.

**Tabel 2.5**  
**Kelompok Sasaran Layanan**

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman	Laporan pengaduan masyarakat	Masyarakat
		Layanan Bantuan Personil	Masyarakat
		Standar Pelayanan Minimal	Masyarakat yang rentan terdampak
2.	Bidang Penegakan Perda	Pelayanan Rekomendasi Reklame	Pelaku usaha
		Layanan rekomendasi tempat usaha	Pelaku usaha menengah dan kecil serta investor

Sumber: data yang diolah, 2025

Tabel 2.5 menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode Renstra. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran

dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, perangkat daerah dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

#### e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan

Disisi lain, Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektor. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Kegiatan Lintas Sektor

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1.	Operasi yustisia	TNI, POLRI dan BAPENDA	Koordinator kegiatan	Penertiban bangunan usaha yang belum membayar pajak	Pelaku usaha tertib dalam pembayaran pajak usaha
2.	Operasi Non Yustisia	Dinsos, Disperindag, Dinkes dan Kecamatan	Operasi Non Yustisia gabungan	Penertiban gangguan trantibum	Terciptanya Trantibum terhadap masyarakat
3.	Pemberdayaan Satlinmas	Satlinmas Desa dan Kelurahan	Patroli dan Pengawasan	Menyelenggarakan trantibum di Desa dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan yang aman, tentran dan tertib
4.	Layanan SPM melalui Posyandu	Posyandu Desa dan Kelurahan	Memberikan pelayanan tindaklanjut pengaduan urusan trantibumlinmas	tindaklanjut pengaduan urusan trantibumlinmas	Pelayanan trantibumlinmas

Sumber: Data diolah, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel 2.6 memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayan perangkat daerah. Selanjutnya, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah secara terpisah atau sekaligus. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada Tabel 2.7 berikut ini:

**Tabel 2.7**  
**Analisa Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Potensi gangguan keamanan, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan terhadap masyarakat	Penyelenggaraan trantibum belum terjangkau di 5 (lima) Kecamatan	Masih belum tertibnya Penegakan perda dan perkada terkait kegiatan masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah.
	Ketersediaan jumlah Pol PP tidak sesuai standar	

	pelaksanaan perda dan perkara belum diseluruhnya ditegakkan	
	Belum dibentuknya unit pelaksana Satpol Pamong Praja Kecamatan	
	Implementasi satlinmas Dalam penyelenggaraan trantibum masih 1,5%	

Sumber: Kertas Kerja Rumusan Masalah, 2025

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja rencana pembangunan daerah, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi program rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program rencana pembangunan daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkannya kedalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program rencana pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut.

Berkenaan dengan Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan organisasi ini sebagai penegak perda, penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi kepala daerah dalam mewujudkan visi, misi dan program melalui penyelenggaraan tugas utama tersebut. Oleh karena itu, perlu dielaborasi lebih jauh relevansi visi, misi rencana pembangunan daerah Kotawaringin Barat dengan tugas utama yang diperankan pada daerah Satpol PP. Hasil telaahan akan meletakkan posisi daerah dalam fokus pencapaian misi yang relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan tepat.

Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian perangkat daerah maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program daerah sebagai berikut: **"Kotawaringin Barat Makin Jaya (Maju, Kinerja Berkelanjutan, dan Menuju Kejayaan)"**. Untuk melaksanakan visi tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) misi yaitu Misi II yaitu **"Mendorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Kerakyatan Dan Hilirisasi Potensi Daerah"**.

Setelah permasalahan telah diidentifikasi, lalu diidentifikasi kembali faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang tersedia pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

**Tabel 2.8**  
**Identifikasi Permasalahan**

Tujuan dan Sasaran RPJMD	Indikator	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Mempengaruhi	
			Pendukung	Penghambat
<b>Tujuan:</b> Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan	<b>Indikator:</b>	Penyelenggaraan trantibum belum terjangkau di 5 (lima) Kecamatan	Belum tersedianya metode pembinaan masyarakat dalam menjaga trantibumlinmas	Belum melakukan kajian akademis mengenai pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
<b>Sasaran:</b> Meningkatnya Investasi Daerah	<b>Indikator:</b> Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas	Cakupan pelayanan trantibum kepada masyarakat belum terjangkau di 5 (lima) Kecamatan	Belum tersedianya sumberdaya untuk menunjang pelayanan trantibum
		Laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran trantibum tidak terdata dengan baik	Dalam mengelola Laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran trantibum masih konvensional	Sarana pendukung IT yang tidak maksimal
		Perda dan perkara yang memuat sanksi belum semua ditegakan oleh Satuan Pol PP	Dari jumlah 41 perda dan perkara yang memuat sanksi, hanya 4 yang ditegakan Satuan Pol PP	SKPD yang membuat perda belum ada tindaklanjut mengenai perda

## **b. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang OPD yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut:

- 1) Permasalahan dari aspek pelayanan dan kinerja Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur. misi pembangunan daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- 2) Isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis yaitu isu global, isu nasional dan isi regional/daerah.
- 3) Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Berdasarkan penentuan isu-isu strategis tersebut, maka isu-isu strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, yaitu:

- 1) Penegakan perda dan perkada terkait kegiatan masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah.
- 2) Ketersediaan sumber daya untuk menunjang pelayanan dasar trantibum
- 3) pembinaan kepada pelaku usaha kecil ekonomi kerakyatan sehingga didalam penataan kota menjadi indah, aman dan tertib.

Agar perumusan isu strategis dapat tergambarkan dengan jelas, berikut rumusan isu strategis lebih rinci dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9  
Telaah Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KHLS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Investasi di sektor industri dan perdagangan.	Penegakan perda masih belum optimal	Pengembangan sektor ekonomi unggulan belum maksimal	Geopolitik dan Geoekonomi yang berdampak terhadap stabilitas keamanan, rantai ekonomi, produksi maupun minyak yang memperikan gejala ekonomi pada negara-negara berkembang	Ketergantungan Ekonomi pada Sektor Hulu dan Lambatnya Hilirisasi	Hilirisasi sektor ekonomi unggulan	Penegakan perda dan perkada terkait kegiatan masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah.
	Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas	Ketersediaan Infrastruktur Dasar		Minimnya Sarana dan Prasarana Layanan Dasar	Pemenuhan dan pemerataan Kebutuhan dasar Masyarakat rentan	Ketersediaan sumber daya untuk menunjang pelayanan dasar trantibum
	Ketersediaan personel Satpol PP dan perlindungan masyarakat masih belum memadai	Pengembangan Sumberdaya Manusia			Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM	
	Penyelenggaraan trantibum belum terjangkau di 5 (lima) Kecamatan	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal			Rendahnya Kapasitas dan Kualitas Konektivitas serta infrastruktur	pembinaan kepada pelaku usaha kecil ekonomi kerakyatan sehingga didalam penataan kota menjadi indah, aman dan tertib.

Sumber: data yang diolah, 2025



Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan strategis, rumusan strategi yang diimplementasikan secara efektif dan efisien akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian sasaran serta mampu menjawab permasalahan dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya dilakukan analisis pada kondisi Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat berdasarkan daya dukung dan hambatan internal maupun eksternal menggunakan Analisis SWOT. Metode ini merupakan salah satu perangkat analisis yang direkomendasikan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, karena kesesuaiannya dengan prinsip perencanaan pembangunan yang sederhana namun memiliki hasil yang relatif kuat dan menysasar pada inti permasalahan sesuai kategorinya sebagai daya dukung atau hambatan internal maupun eksternal.

Ilustrasi analisis SWOT untuk perumusan alternatif kebijakan strategi sebagai berikut dalam bentuk Tabel 2.10 pada halaman berikutnya.

**Tabel 2.10**  
**Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT**

<b>T</b> THREATS	<b>STRENGTH (kekuatan)</b>	<b>WEAKNESS (kelemahan)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dasar hukum dalam menjalankan kewenangan.</li> <li>2. Memiliki PPNS guna penindakan pelanggaran perda dan perkada.</li> <li>3. Masuk didalam urusan wajib pelayanan dasar unsur pemerintahan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda dan perkada yang memuat sanksi belum semua ditegakan oleh Satuan Pol PP.</li> <li>2. Laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran trantibum masih konvensional.</li> <li>3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga trantibumlinmas.</li> </ol>
<b>O</b> OPPORTUNITIES	<b>OPPORTUNITY (Peluang)</b>	<b>THREAT (ancaman)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan jumlah anggota Pol PP.</li> <li>2. Pembentukan UPTD Satpol PP di Kecamatan.</li> <li>3. Mewujudkan Pol PP dan Satlinmas profesional, berinovasi dan berwibawa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat berdampak pada fasilitas umum dan aset pemerintah lainnya</li> <li>2. Meningkatnya kasus pelanggaran perda dan perkada setiap tahun.</li> <li>3. dikenakan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak penegakan perda dan perkada</li> </ol>
<b>W</b> WEAKNESSES		
<b>S</b> STRENGTHS		

Sumber: Data yang diolah, 2025

# **BAB III** TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## **1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029**

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 adalah “**KOTAWARINGIN BARAT MAKIN JAYA (Maju, Kinerja Berkelanjutan, dan Menuju Kejayaan)**”. Adapun misi Kabupaten Katingan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Misi I : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Unggul, Berkarakter, dan Berdaya Saing.
2. Misi II : Mendorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Kerakyatan dan Hilirisasi Potensi Daerah.

3. Misi III : Membangun Masyarakat Madani yang Sejahtera dan Harmoni;
4. Misi IV : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan; dan
5. Misi V : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Melalui Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Transparan Berbasis Teknologi Informasi.

Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat berperan dalam mendukung misi ke II (dua), dengan tujuan yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan. Sasarannya adalah Meningkatnya Investasi Daerah dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat**

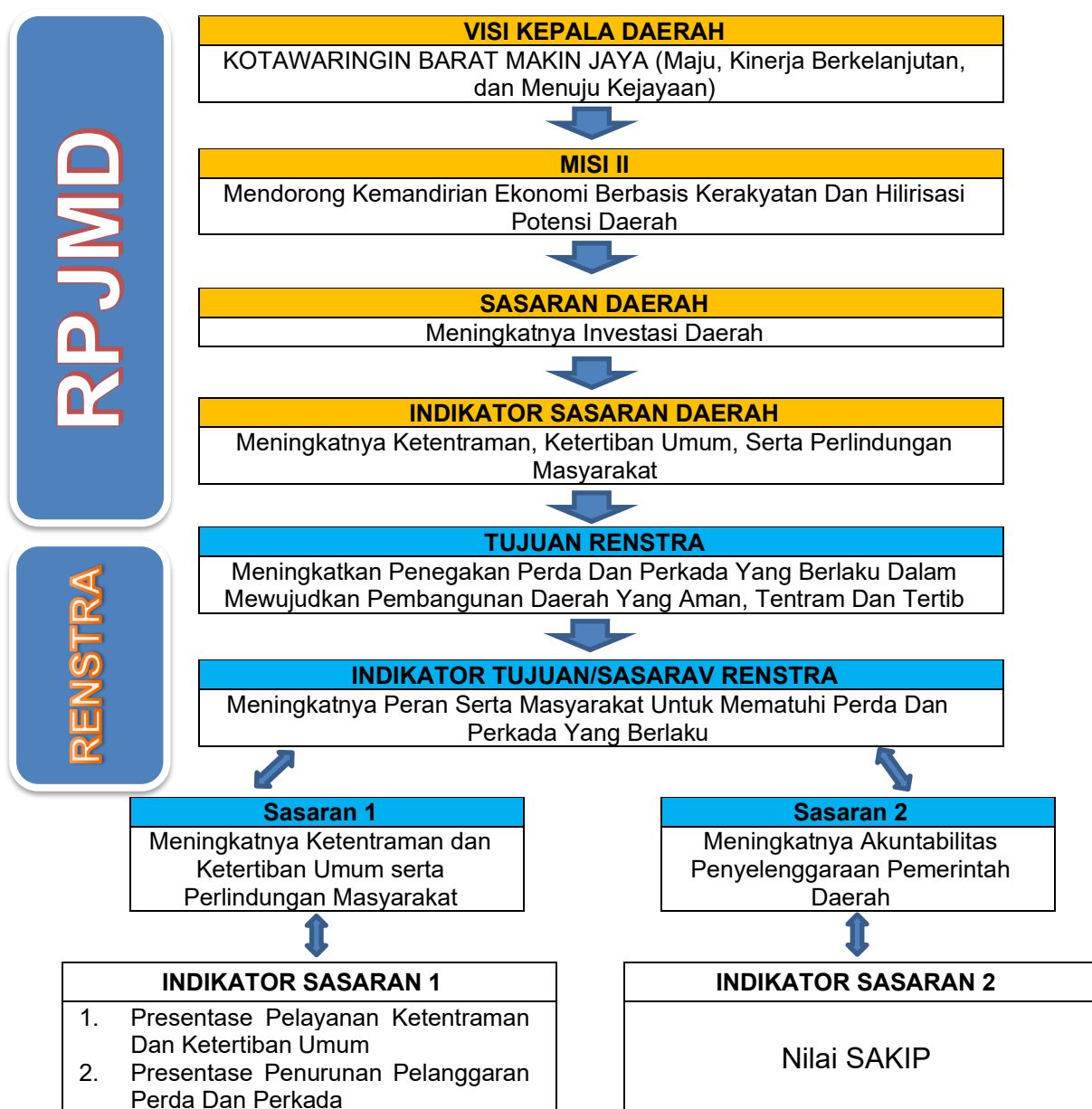
NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatkan penegakan Perda dan Perkada yang berlaku dalam mewujudkan pembangunan daerah yang aman, tentram dan tertib	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Presentase Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	
			Presentase Penurunan Pelanggaran Perda Dan Perkada	13	15	18	25	30	30	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	70	80	90	100	100	100	

Sumber: Data yang diolah, 2025



Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara *input*, *output*, *outcome*, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Adapun *logical framework* Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk Matrik 3.1 sebagai berikut:





<b>PROGRAM 1</b>	<b>PROGRAM 2</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
<b>KEGIATAN</b>	<b>KEGIATAN</b>
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /kota dan Peraturan bupati /wali Kota
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

## 2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

### a. Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi perangkat daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit langsung pada pencapaian sasaran serta mampu menjawab permasalahan

dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya dilakukan analisis pada kondisi Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat berdasarkan daya dukung dan hambatan internal maupun eksternal menggunakan Analisis SWOT. Metode ini merupakan salah satu perangkat analisis yang direkomendasikan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019, karena kesesuaiannya dengan prinsip perencanaan pembangunan yang sederhana namun memiliki hasil yang relatif kuat dan menyasar pada inti permasalahan sesuai kategorinya sebagai daya dukung atau hambatan internal maupun eksternal.

Ilustrasi analisis SWOT untuk perumusan alternatif kebijakan strategi sebagai berikut dalam bentuk Tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT**

<b>S</b> STRENGTHS <b>W</b> WEAKNESSES <b>O</b> OPPORTUNITIES <b>T</b> THREATS	<b>STRENGTH (kekuatan)</b>	<b>WEAKNESS (kelemahan)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki dasar hukum dalam menjalankan kewenangan.</li> <li>Memiliki PPNS guna penindakan pelanggaran perda dan perkara.</li> <li>Masuk didalam urusan wajib pelayanan dasar unsur pemerintahan daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perda dan perkara yang memuat sanksi belum semua ditegakan oleh Satuan Pol PP.</li> <li>Laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran trantibum masih konvensional.</li> <li>Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga trantibumlinmas.</li> </ol>
	<b>OPPORTUNITY (Peluang)</b>	<b>THREAT (ancaman)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penambahan jumlah anggota Pol PP.</li> <li>Pembentukan UPTD Satpol PP di Kecamatan.</li> <li>Mewujudkan Pol PP dan Satlinmas profesional, berinovasi dan berwibawa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat berdampak pada fasilitas umum dan aset pemerintah lainnya</li> <li>Meningkatnya kasus pelanggaran perda dan perkara setiap tahun.</li> <li>dikenakan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak penegakan perda dan perkara</li> </ol>

STRATEGI

STRATEGI	
S + O	W + O
<ol style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi peran dan fungsi Satpol PP dan yang berintegritas melalui peningkatan kuantitas Pol PP sesuai aturan</li> <li>Peningkatan kapasitas PPNS dalam penegakan perda dan perkara untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati</li> <li>Merumuskan nomenklatur yang baru guna membentuk Satpol PP di Kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum di lingkungan sosial masyarakat</li> <li>Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis</li> <li>Pembedayaan Satlinmas untuk meningkatkan penyelenggaraan trantibum di Desa dan Kelurahan.</li> </ol>
S + T	W + T
<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dalam Mewujudkan Kesamaan Persepsi Penegakan Perda dan Perkada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mewujudkan pola manajemen yang strategis dan terukur untuk mengoptimisasi penyelenggaraan pelayanan Satpol PP di seluruh Kecamatan Kab. Kotawaringin Barat.</li> </ol>

<p>2. Penguatan kapasitas dengan pendekatan SOP Trantibum agar terhindar dari kesalahan penegakan perda dan perkara sehingga tidak mengakibatkan Ganti rugi kepada Masyarakat.</p> <p>3. Penambahan jumlah PPNS dari internal Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat</p>	<p>2. Revitalisasi media/sarana pelayanan laporan pengaduan masyarakat.</p> <p>3. Peningkatan pembinaan masyarakat di enam Kecamatan.</p>
---	---

Setelah melakukan analisis SWOT dapat kita pisahkan permasalahan tersebut dengan berbagai isu alternatif sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Alternatif strategis menurut perspektif**

PERSPEKTIF MASYARAKAT		STRATEGI
Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Sinegritas stakeholder dalam peningkatan keamanan, ketentraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis	Pembinaan kepada pelaku usaha kecil ekonomi kerakyatan sehingga didalam penataan kota menjadi indah, aman dan tertib.
Revitalisasi Peran dan Fungsi Satpol PP yang Berintegritas melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur		
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN	PERSPEKTIF INTERNAL	STRATEGI
Mapping data base kawasan rawan pelanggaran perda, perkara, sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tentram	Optimalisasi Kerjasama antar Kelembagaan Sebagai Upaya Menjawab Tuntutan Reformasi Birokrasi	Mapping data base kawasan rawan pelanggaran perda, perkara sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tentram
	Optimalisasi forum musyawarah pimpinan daerah (muspida) dalam mewujudkan kesamaan persepsi penegakan perda dan perkara	
	Identifikasi manajemen resiko dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara sebagai upaya meminimalisir resiko	
PERSPEKTIF KEUANGAN		STRATEGI
Optimalisasi anggaran sebagai Upaya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Satpol PP		Ketersediaan sumber daya untuk menunjang pelayanan dasar trantibum

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berikut ini adalah proses perumusan strategi Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat, yang meliputi antara lain dari Tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Penentuan Strategi Satuan Pol PP**  
**Kab. Kotawaringin Barat**

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1.	Penegakan penegakan Perda masih belum optimal	Meningkatkan penegakan perda dan perkara yang berlaku dalam mewujudkan pembangunan daerah yang aman tentram dan tertib	Pembinaan kepada pelaku usaha kecil ekonomi kerakyatan sehingga didalam penataan kota menjadi indah, aman dan tertib.
2.	Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas		Ketersediaan sumber daya untuk menunjang pelayanan dasar trantibum
3.	Ketersediaan personel Satpol PP dan perlindungan masyarakat masih belum memadai		Mapping data base kawasan rawan pelanggaran perda, perkara sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tentram
4.	Penyelenggaraan trantibum belum terjangkau di 5 (lima) Kecamatan		

Sumber: Data yang diolah, 2025

#### **b. Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Melihat dari berbagai alternatif strategi yang telah identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi yang telah identifikasi oleh Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat, hal ini berguna agar dapat menentukan arah kebijakan mana yang akan ditetapkan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan tertib di wilayah Kab. Kotawaringin Barat.

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Arah Kebijakan Strategis Periode**  
**Tahun 2025-2029**

<b>OPERASIONALISASI NSPK</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RPJMD</b>	<b>STRATEGI RENSTRA PD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD</b>
Menegakkan hukum secara adil, meningkatkan patroli pengawasan, memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong partisipasi masyarakat untuk menurunkan gangguan ketertiban dan meningkatkan rasa aman.	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.	Pembinaan kepada pelaku usaha kecil ekonomi kerakyatan sehingga didalam penataan kota menjadi indah, aman dan tertib.	Pencegahan dan Pengawasan serta pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Ketersediaan sumber daya untuk menunjang pelayanan dasar trantibum	Pemenuhan sarana prasarana ketertiban umum dan ketentraman dan lingkungan masyarakat
		Mapping data base kawasan rawan pelanggaran perda, perkara sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tentram	Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPNS untuk penguatan proses administrasi penyidik

Sumber: Data yang diolah, 2025

### c. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan

disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang yang tersedia didalam Tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Pentahapan Renstra Satuan Pol PP**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur	Peningkatan kualitas penegakkan peraturan daerah dan ketertiban umum	Terwujudnya pelayanan terpadu dan profesional	Pengembangan sistem pelayanan terpadu dan akuntabel	Terwujudnya layanan prima dan citra profesional Satpol PP
1. Meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan kompetensi SDM Satpol PP, PPNS dan Satlinmas melalui pelatihan teknis	1. Melaksanakan penegakkan perda dan perkara dengan pendekatan persuasif, humanis dan terukur	1. Terbangunnya layanan satpol pp dan damkar yang responsif, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informas	1. Membangun sistem informasi manajemen kinerja satpol pp berbasis teknologi.	1. Menciptakan pelayanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.
2. Menjalin koordinasi lintas sektor (TNI, POLRI, Kecamatan, Satlinmas dan stakeholder teknis lainnya) dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	2. Mengoptimalkan pengawasan, operasi penertiban, serta pembinaan masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum	2. Terciptanya citra Satpol PP sebagai perangkat daerah yang professional, inovasi dan berwibawa	2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan kinerja perangkat daerah	2. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat dan humanis
3. Memperkuat sarana prasarana layanan dasar, terutama kendaraan operasional dan peralatan trantibum	3. Mempeluas cakupan penyelenggaraan trantibum ke 6 (enam) Kecamatan	3. Optimalisasi koordinasi lisntas sektoral dalam penegakkan perda, ketertiban umum, dan penanggulangan kebakaran/non kebakaran	3. Memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan TNI, POLRI, Kecamatan, Satlinmas dan stakeholder teknis lainnya dan masyarakat	3. Menjadi perangkat daerah yang menjadi teladan dalam penegakkan perda dan perkara serta ketertiban umum

Sumber: Data yang diolah, 2025

# BAB IV

## PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

### 1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III dokumen Renstra ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Satuan Pol PP Kab. Kotawarigin Barat disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Renstra Satuan Pol PP Kab. Kotawarigin Barat mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan renja perangkat daerah Tahun 2030.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Satuan Pol PP Kab. Kotawarigin Barat yang merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan output yang diharapkan.

**Tabel 4.1**  
**Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Pol PP**  
**Kabupaten Kotawaringin Barat**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja</b>							
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai standar operasional prosedur	Persentase pencegahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) (%)		
					Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (Angka)		
					Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada (%)		
					Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						
Jumlah Laporan Hasil Penyidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1.05.02.2.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
					Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1.05.02.2.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		
				Tersedianya SDM menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah sesuai dengan standar	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah		
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah		
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS		
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
		Meningkatkan Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat				Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
			Meningkatnya Ketentraman, Keterlibatan Umum, Serta Pelindungan Masyarakat			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Presentase pemberdayaan masyarakat yang aktif melakukan keamanan lingkungan	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum yang Dicegah Melalui Deleksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani/umlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. ( Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterliban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterliban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterliban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
					Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	1.05.02.2.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	
					Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1.05.02.2.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	
					Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1.05.02.2.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	
					Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
		Meningkatkan kualitas capaian kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Laporan Keuangan dan Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan serta Evaluasi Kinerja (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: sipd-ri/kemendari.go.id/renstra



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN							
			2025			2026			2027			2028					2029			2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET				PAGU	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.584.520.000,00		11.988.721.800,00		12.473.932.700,00		14.365.773.400,00		13.440.896.300,00										
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.188.317.122,00		10.486.038.000,00		10.864.735.500,00		11.738.586.400,00		11.504.572.700,00										
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	100	100	100	10.188.317.122,00	100	10.486.038.000,00	100	10.864.735.500,00	100	11.738.586.400,00	100	11.504.572.700,00	100	1.05.0.00.0.00.0.1.00 - Satuan Polisi Pamong Praja								
	Persentase Laporan Keuangan dan Ketepatan Waktu Penyusunan Perencanaan serta Evaluasi Kinerja (%)	100	100	100		100		100		100		100											
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					9.008.356.383,00		9.008.356.383,00		9.008.356.383,00		9.008.356.383,00		9.008.356.383,00										
Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74	95	95	9.008.356.383,00	95	9.008.356.383,00	95	9.008.356.383,00	95	9.008.356.383,00	95	9.008.356.383,00										
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	45	45	45		45		45		45		45											
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1											
	Jumlah Dokumen Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	150	150	250		250		250		250		250											
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	45	45	45		45		45		45		45											
1.05.01.2.02.0001 - Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN					9.002.464.133,00		9.002.464.133,00		9.002.464.133,00		9.002.464.133,00		9.002.464.133,00			KAB. KOTAWARINGIN BARAT							



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74	95	95	9.002.464.133,00	95	9.002.464.133,00	95	9.002.464.133,00	95	9.002.464.133,00	95	9.002.464.133,00			
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					4.335.000,00		4.335.000,00		4.335.000,00		4.335.000,00		4.335.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	150	150	250	4.335.000,00	250	4.335.000,00	250	4.335.000,00	250	4.335.000,00	250	4.335.000,00			
1.05.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	45	45	45	1.000.000,00	45	1.000.000,00	45	1.000.000,00	45	1.000.000,00	45	1.000.000,00			
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					136.500,00		136.500,00		136.500,00		136.500,00		136.500,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	136.500,00	1	136.500,00	1	136.500,00	1	136.500,00	1	136.500,00			
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					420.750,00		420.750,00		420.750,00		420.750,00		420.750,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	45	45	45	420.750,00	45	420.750,00	45	420.750,00	45	420.750,00	45	420.750,00			
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		4		4				
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00			
1.05.012.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. KOTAWARIGIN BARAT	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00			
1.05.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					191.750.000,00		338.622.597,00		355.000.000,00		689.920.997,00		583.257.297,00			
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	191.750.000,00	1	338.622.597,00	1	355.000.000,00	1	689.920.997,00	1	583.257.297,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	10		10		10		10		10				
1.05.012.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					20.000.000,00		153.622.597,00		150.000.000,00		289.920.997,00		231.507.297,00		KAB. KOTAWARIGIN BARAT	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	20.000.000,00	1	153.622.597,00	1	150.000.000,00	1	289.920.997,00	1	231.507.297,00			
1.05.012.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	2	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00			
1.05.012.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					46.750.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		150.000.000,00		101.750.000,00			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	10	46.750.000,00	10	60.000.000,00	10	80.000.000,00	10	150.000.000,00	10	101.750.000,00			
1.05.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					77.697.950,00		80.959.020,00		98.259.020,00		137.459.020,00		90.859.020,00			
Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	77.697.950,00	2	80.959.020,00	2	98.259.020,00	2	137.459.020,00	2	90.859.020,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	5	7		10		10		10		10					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	1		2		2		2		2					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	2		1		2		2		2					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2		1		2		2		2					
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.273.720,00		6.300.000,00		6.400.000,00		6.500.000,00		6.600.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	6.273.720,00	1	6.300.000,00	1	6.400.000,00	1	6.500.000,00	1	6.600.000,00				
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor					20.959.020,00		20.959.020,00		20.959.020,00		20.959.020,00		20.959.020,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT		
Tersedianya Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	2	20.959.020,00	1	20.959.020,00	2	20.959.020,00	2	20.959.020,00	2	20.959.020,00				
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15.000.000,00		17.000.000,00		25.000.000,00		48.900.000,00		23.000.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2	15.000.000,00	1	17.000.000,00	2	25.000.000,00	2	48.900.000,00	2	23.000.000,00				
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.813.850,00		2.900.000,00		3.000.000,00		3.100.000,00		3.200.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	2.813.850,00	2	2.900.000,00	2	3.000.000,00	2	3.100.000,00	2	3.200.000,00				
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					7.651.360,00		7.800.000,00		7.900.000,00		8.000.000,00		8.100.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT		
Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	1	7.651.360,00	2	7.800.000,00	2	7.900.000,00	2	8.000.000,00	2	8.100.000,00				
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					25.000.000,00		26.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		29.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	5	7	25.000.000,00	10	28.000.000,00	10	35.000.000,00	10	50.000.000,00	10	29.000.000,00			
1.05.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					310.652.622,00		410.000.000,00		647.020.097,00		801.750.000,00		950.000.000,00			
Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	1	1	310.652.622,00	5	410.000.000,00	2	647.020.097,00	1	801.750.000,00	1	950.000.000,00			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	17	20		15		10		10		10				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
1.05.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
1.05.012.07.0005 - Pengadaan Mebel					20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	1	1	20.000.000,00	5	30.000.000,00	2	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00			
1.05.012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					120.652.622,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		140.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	17	20	120.652.622,00	15	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	140.000.000,00			
1.05.012.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00		100.000.000,00		157.020.097,00		151.750.000,00		250.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	157.020.097,00	1	151.750.000,00	1	250.000.000,00			
1.05.012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000,00		60.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00			
1.05.012.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					70.000.000,00		70.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		250.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	250.000.000,00			
1.05.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					164.860.167,00		172.100.000,00		179.100.000,00		186.100.000,00		193.100.000,00			
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	164.860.167,00	12	172.100.000,00	12	179.100.000,00	12	186.100.000,00	12	193.100.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
1.05.012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00			
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00			
1.05.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					68.338.896,00		70.000.000,00		71.000.000,00		72.000.000,00		73.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	68.338.896,00	12	70.000.000,00	12	71.000.000,00	12	72.000.000,00	12	73.000.000,00			
1.05.012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	50.000.000,00	12	55.000.000,00	12	60.000.000,00	12	65.000.000,00	12	70.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.05.012.09.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					46.421.271,00		47.000.000,00		48.000.000,00		49.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	46.421.271,00	12	47.000.000,00	12	48.000.000,00	12	49.000.000,00	12	50.000.000,00				
1.05.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					420.000.000,00		461.000.000,00		562.000.000,00		900.000.000,00		664.000.000,00				
Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24	24	420.000.000,00	24	461.000.000,00	24	562.000.000,00	24	900.000.000,00	24	664.000.000,00				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	22		22		22		22		22					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2	2		2		2		2		2					
1.05.012.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	25.000.000,00				
1.05.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	22	310.000.000,00	22	310.000.000,00	22	310.000.000,00	22	310.000.000,00	22	310.000.000,00				
1.05.012.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		
Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00				
1.05.012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		50.000.000,00		19.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	24	24	15.000.000,00	24	16.000.000,00	24	17.000.000,00	24	50.000.000,00	24	19.000.000,00				
1.05.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					30.000.000,00		50.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	2	30.000.000,00	2	50.000.000,00	2	150.000.000,00	2	300.000.000,00	2	150.000.000,00				
1.05.012.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		
Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	2	30.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	200.000.000,00	2	150.000.000,00				
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.398.202.878,00		1.502.683.800,00		1.609.197.200,00		2.627.187.000,00		1.936.323.600,00				
Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum, Serta Pelindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	13	11	15	1.160.617.878,00	18	1.265.920.900,00	25	1.321.250.500,00	30	2.327.187.000,00	40	1.534.823.600,00	1.05.000.000.01.00 - Satuan Polisi Pamong Praja			
1.05.022.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.160.617.878,00		1.265.920.900,00		1.321.250.500,00		2.327.187.000,00		1.534.823.600,00				
Persentase pemberdayaan masyarakat yang aktif melakukan keamanan lingkungan	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Transtibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1	1	1	1.160.617.878,00	1	1.265.920.900,00	1	1.321.250.500,00	1	2.327.187.000,00	1	1.534.823.600,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	12	4	25.000.000,00	10	30.000.000,00	4	35.000.000,00	10	80.000.000,00	4	50.000.000,00			
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum					100.000.000,00		115.000.000,00		128.000.000,00		200.000.000,00		140.000.000,00		KAB. KOTAWARIGIN BARAT	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	12	12	12	100.000.000,00	12	115.000.000,00	12	128.000.000,00	12	200.000.000,00	12	140.000.000,00			
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum					100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		242.187.000,00		100.000.000,00		KAB. KOTAWARIGIN BARAT	
Tertaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1	1	3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	120.000.000,00	3	242.187.000,00	3	100.000.000,00			
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		150.000.000,00		90.000.000,00		KAB. KOTAWARIGIN BARAT	
Tersedianya Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	3	8	4	50.000.000,00	4	60.000.000,00	4	70.000.000,00	4	150.000.000,00	4	90.000.000,00			
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional					20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		150.000.000,00		50.000.000,00		KAB. KOTAWARIGIN BARAT	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	10	50	50	20.000.000,00	10	25.000.000,00	30	30.000.000,00	150	150.000.000,00	50	50.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.022.01.0012 - Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan					30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
meningkatkan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	5	5	10	30.000.000,00	10	35.000.000,00	10	40.000.000,00	10	100.000.000,00	10	80.000.000,00			
1.05.022.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat					192.015.878,00		205.000.000,00		210.000.000,00		300.000.000,00		220.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	475	225	357	192.015.878,00	358	205.000.000,00	358	210.000.000,00	370	300.000.000,00	358	220.000.000,00			
1.05.022.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					45.000.000,00		50.000.000,00		55.350.500,00		65.000.000,00		81.823.600,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	55	50	50	45.000.000,00	50	50.000.000,00	50	55.350.500,00	100	65.000.000,00	80	81.823.600,00			
1.05.022.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		140.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	12	12	100.000.000,00	12	110.000.000,00	12	120.000.000,00	12	200.000.000,00	12	140.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.022.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kenusuhan Massa					190.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		210.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tertelaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kenusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kenusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	200	140	200	190.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	250	250.000.000,00	200	210.000.000,00			
1.05.022.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah					11.822.000,00		13.120.900,00		13.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani/umlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	4	4	4	11.822.000,00	4	13.120.900,00	4	13.000.000,00	4	25.000.000,00	4	20.000.000,00			
1.05.022.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterliban Umum					90.000.000,00		95.000.000,00		91.000.000,00		135.000.000,00		93.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterliban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterliban Umum yang Tersedia (Unit)	1	1	84	90.000.000,00	85	95.000.000,00	82	91.000.000,00	95	135.000.000,00	83	93.000.000,00			
1.05.022.01.0019 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota					13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1	1	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
1.05.022.01.0022 - Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat					120.000.000,00		130.000.000,00		120.000.000,00		200.000.000,00		120.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Transtibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Transtibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal (Dokumen)	1	1	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00	1	120.000.000,00			
1.05.02.2.01.0023 - Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Keterlibatan Umum					3.700.000,00		3.800.000,00		3.900.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	1	1	1	3.700.000,00	1	3.800.000,00	1	3.900.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
1.05.02.2.01.0024 - Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan transtibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tertaksananya penyelenggaraan transtibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-689 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan transtibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-689 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	3	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	50.000.000,00	12	30.000.000,00			
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					50.080.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		150.000.000,00		80.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT	
Tertaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	50	50	50	50.080.000,00	50	51.000.000,00	50	52.000.000,00	50	150.000.000,00	50	80.000.000,00			
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang diindikasikan (%)	85	88	90	235.585.000,00	92	236.762.900,00	94	287.946.700,00	95	300.000.000,00	98	401.500.000,00			
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					150.585.000,00		150.762.900,00		178.000.000,00		187.000.000,00		246.500.000,00			
Tertaksananya penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai standar operasional prosedur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	12	150.585.000,00	12	150.762.900,00	12	178.000.000,00	12	187.000.000,00	12	246.500.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	12	20	20		20		20		20		20					
	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1	1	2		2		3		3		3					
	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1	8	5		3		1		1		5					
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2	2	6		6		6		6		6					
	Jumlah Laporan Hasil Penyidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	7		7		8		8		8					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1	1	0		1		1		1		1					
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	10	0	20		20		20		20		20					
1.05.022.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00				KAB. KOTAWARIN GIN BARAT
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1	8	5	5.000.000,00	3	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5	15.000.000,00				
1.05.022.02.0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)					0,00		2.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		9.500.000,00				KAB. KOTAWARIN GIN BARAT
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	1	1	0	0,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00	1	9.500.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.05.02.2.02.0007 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					15.522.000,00		16.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	7	15.522.000,00	7	16.000.000,00	8	20.000.000,00	8	20.000.000,00	8	25.000.000,00				
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	10	0	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	30.000.000,00				
1.05.02.2.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah					16.116.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	12	20	20	16.116.000,00	20	17.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	30.000.000,00				
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					35.000.000,00		29.762.900,00		35.000.000,00		35.000.000,00		42.000.000,00		Kumai , Arut Selatan , Kotawaringin Lama , Arut Utara , Pangkalan Lada , Pangkalan Banteng		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2	2	6	35.000.000,00	6	29.762.900,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	6	42.000.000,00				
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					25.090.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		28.000.000,00		35.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12	12	25.090.000,00	12	25.000.000,00	12	27.000.000,00	12	28.000.000,00	12	35.000.000,00				
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					18.857.000,00		18.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		35.000.000,00		KAB. KOTAWARIN GIN BARAT		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	12	12	12	18.857.000,00	12	18.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.000.000,00	12	35.000.000,00				
1.05.02.2.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada					10.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		KAB. KOTAWARIGIN BARAT		
Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1	1	2	10.000.000,00	2	13.000.000,00	3	15.000.000,00	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00				
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					85.000.000,00		86.000.000,00		109.946.700,00		113.000.000,00		155.000.000,00				
Tersedianya SDM menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah sesuai dengan standar	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	2	1	5	85.000.000,00	5	86.000.000,00	5	109.946.700,00	5	113.000.000,00	5	155.000.000,00				
	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1	1	1		1		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	2	2	5		5		5		5		5					
1.05.02.2.03.0003 - Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00				
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	40.000.000,00				
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah					25.000.000,00		25.000.000,00		37.946.700,00		40.000.000,00		45.000.000,00				
Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2	37.946.700,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	2	1	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	30.000.000,00			
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					20.000.000,00		21.000.000,00		32.000.000,00		33.000.000,00		40.000.000,00		KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	2	2	5	20.000.000,00	5	21.000.000,00	5	32.000.000,00	5	33.000.000,00	5	40.000.000,00			

Sumber: sipd-ri/kemendagri.go.id/renstra

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.



**Tabel 4.3**  
**Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja</b>				
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Pelindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	
		<i>Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah.	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteram	
			Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			

		<b>Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Pelindungan Masyarakat</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	
		Persenetase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
			Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.	
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

Sumber: Data yang diolah, 2025

## 2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Trantibumlinmas

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

### a. Indikator Kinerja Utama

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Utama atau disebut IKU. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut disampaikan IKU Satuan Pol PP Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 dalam bentuk Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perkada	%	13	15	18	25	30	33	
2.	Persentase Pelayanan dan ketentraman dan ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai SAKIP	Nilai	80	90	100	100	100	100	

Sumber: SK Penetapan IKU Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat Nomor 01 Tahun 2025

b. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci atau disebut IKK Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: LPPD

c. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal atau disebut SPM Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.6**  
**Standar Pelayanan Minimal**  
**Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan	%	100	100	100	100	100	100	

	ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP								
2.	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

# BAB V PENUTUP

## 1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis S Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif. Rencana Strategis perangkat daerah ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat.

Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029.

## 2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat periode berjalan.
- b. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara *input, output, dan outcome*.
- c. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
- d. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
- e. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

### **3. Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Satuan Pol PP Kab.

Kotawaringin Barat, namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.